

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahannya Menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip dari penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, prakarsa, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta yang bertujuan agar peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada konsep ini bahwa pembangunan nasional mementingkan pada komponen yang ada pada suatu negara tersebut. Komponen bangsa harus saling bersinergi dan saling mengisi untuk mencapainya suatu tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Peran masyarakat dan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengembangkan demokrasi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sarana utama bagi suatu negara, sektor swasta dan masyarakat agar mereka

dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Usaha peningkatan kualitas sumber daya desa dan masyarakat secara keseluruhan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. Pada pelaksanaannya, pembangunan desa memiliki tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan yang berada di desa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan yang ada di desa harus berdasarkan aspirasi atau keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : “desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014, maka dengan secara jelas hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan desa. Adanya Undang-Undang ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi desa, karena

Undang-Undang ini dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa.

Adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud. Pelaku utama dalam pembangunan pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksana pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat di berbagai daerah juga harus ikut serta dalam secara aktif mengisi dan melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan yaitu sebagai pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun peran masyarakat yaitu turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pikiran maupun bantuan tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kepemimpinan diambil dari asal kata pemimpin yang artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggara suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan yaitu suatu bentuk dominasi yang di dasari oleh kemampuan pribadi, yaitu mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan (Solekhan, 2012:59). Jadi sangat pentingnya kinerja kepemimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Kepala desa tentunya wajib melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib disosialisasikan dan memberikan arahan kepada masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, dimana masyarakat diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Berhasil atau tidaknya pembangunan desa sangat tergantung kepada aparat serta masyarakat sebagai objek maupun subjek pembangunan.

Keberhasilan tersebut tidak dapat tercapai hanya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang terkait tanpa mitra yang bisa mengetahui sepenuhnya kebutuhan masyarakat desa. Dan kebutuhan masyarakat hanya diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu melaksanakan pembangunan harus selalu melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan tersebut sekaligus objek yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan di Desa Pasirsari, kepala desa diharuskan berperan aktif dalam menyusun kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat dan aparatur desa sebagai bawahnya. Masyarakat juga bagian dari suksesnya pelaksanaan program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya diharapkan dan mewujudkan pembangunan di Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, karena kembali pada pembangunan yang dilakukan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terciptanya pembangunan yang baik, pemerataan dan perimbangan. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya dibebankan kepada desa atau kepala desa dan jajarannya, tetapi menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat sebagai indikator dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan keuangan desa.

Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

lagi oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa dengan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, hibah atau sumbangan pihak ketiga.

Pasirsari sebagai desa yang berada ditengah lingkungan industri menjadi sebuah desa yang tatanan sosial berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern dan terbuka, akulturasi budaya dan nilai sosial menjadi sebuah keniscayaan. Secara ekonomi keberadaan kawasan industri memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat Pasirsari walaupun kenyataan yang terjadi saat ini tingkat pengangguran di Pasirsari dan sulitnya mendapat pekerjaan disektor industri masih menjadi sebuah ironi dari keberadaan kawasan industri.

Tabel 1.1 Pembangunan Desa Pasirsari

No	Bidang Kegiatan	Target	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Persentase
1	Urusan Pembangunan :				70%
	1. Jalan Lingkungan (Jaling)	87 Unit	61 Unit	26 Unit	
	2. Jalan Desa	4 Unit	2 Unit	2 Unit	50%
	3. Renovasi Masjid/Musholla	15 Unit	12 Unit	3 Unit	
	4. Drainase	100 Unit	80 Unit	20 Unit	80%
	5. Jembatan Desa	5 Unit	4 Unit	1 Unit	80%
	6. Penerangan Jalan Umum	22 Unit	15 Unit	7 Unit	68%

2	Urusan Kesejahteraan :				
	1. Posyandu	6 Unit	4 Unit	2 Unit	66%
	2. Rumah Layak Huni	29 Unit	5 Unit	24 Unit	17%
	3. Pembinaan Guru Ngaji	36 Kali	32 Kali	4 Kali	88%
	4. Beasiswa Anak Kurang Mampu	6 Kali	4 Kali	2 Kali	66%
3	Urusan Ketentraman dan Ketertiban :				
	1. Siskamling	14 Unit	9 Unit	5 Unit	64%
4	Urusan Pemerintahan :				
	1. Gedung Serba Guna Desa	1 Unit	1 Unit	-	100%
	2. Kantor BPD	1 Unit	1 Unit	-	100%
	3. Ruang Terbuka Hijau	10 Unit	1 Unit	9 Unit	10%
	4. Kantor Sekretariat RT/RW	40 Unit	1 Unit	39 Unit	10%
	5. Tempat pembuangan sampah sementara disemua lingkungan RT	20 Unit	5 unit	15 Unit	25%

Sumber : Data Desa Pasirsari,2021

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Pasirsari yang bersumber dari alokasi dana desa, bantuan provinsi dan transfer dari Pemerintah Pusat (APBN) cukup berjalan dengan baik, namun pembangunan “non fisik” masyarakat desa Pasirsari masih harus menjadi perhatian serius.

Sejalan dengan uraian di atas, peneliti melakukan wawancara awal dengan masyarakat Desa Pasirsari mengenai kepemimpinan Kepala Desa Pasirsari dengan pertanyaan “Pak, menurut bapak bagaimana kepemimpinan Kepala Desa saat ini terhadap pembangunan Desa Pasirsari?, Sebagai berikut “Saya Sebagai warga desa Pasirsari tentu merasakan kepemimpinan kepala desa saat ini, menurut saya untuk saat ini pembangunan Desa Pasirsari tidak terlihat ada kemajuan yang signifikan misalnya seperti infrastruktur jalan di desa ini masih banyak yang rusak padahal lalu lintas di desa ini adalah akses untuk ke kawasan industri serta masih banyak penangguran yang saya lihat padahal Desa Pasirsari ini kan sangat dekat dengan perindustrian di Kabupaten Bekasi, jadi bisa disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Pasirsari ini itu seperti apa”-(*Supardi, Warga Desa Pasirsari, 10 September 2021*)

Peneliti Juga melakukan wawancara kepada Pemuda Karang Taruna Desa Pasirsari dengan pertanyaan yang sama yaitu “bagaimana kepemimpinan kepala desa pasirsari kak?”, sebagai berikut “saya sebagai anak muda desa pasirsari ya turut memperhatikan pembangunan atas kepemimpinan kepala desa ini ya apalagi kan sekarang banyak kemajuan seperti jalan yang saya lintasi untuk menuju ke kerjaan saya sudah mulai baik” – (*Rizky, Warga Desa Pasirsari 11 September 2021*)

Pertanyaan yang sama juga dilakukan peneliti kepada salah satu warga desa pasirsari dengan pertanyaan “bagaimana kepemimpinan kepala desa pasirsari mbak?, sebagai berikut “kepemimpinan kepala desa sekarang cukup baik ya meskipun masih ada beberapa yang kurang misalnya, ada beberapa progam desa yang saya tidak tahu, disini saya hanya mengamati program yang berjalan saja saya tidak tahu proses awalnya” – (*Ratni, Warga Desa Pasirsari 12 september 2021*)

Berdasarkan uraian data di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan seseorang mempengaruhi tingkat pemerataan pembangunan di Desa Pasirsari karena dapat dilihat dari data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan di desa Pasirsari walaupun hanya data sementara , Pembangunan dapat dilihat pada data yang peneliti tuliskan di Tabel 1.1 Tabel Pembangunan Desa Pasirsari tidak

adanya pemerataan pembangunan pada Desa Pasirsari. menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengangkat judul Skripsi “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Pasirsari dalam melaksanakan program Pembangunan Desa Pasirsari?
2. Hambatan – hambatan apa saja yang di hadapi Kepala Desa Pasirsari dalam melaksanakan Program Pembangunan di Desa Pasirsari?
3. Upaya – upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut seperti yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini yang telah dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan kepala desa dalam menggerakan pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang di hadapi Kepala Desa Pasirsari dalam melakukan kepemimpinannya.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang di lakukan untuk mengatasi hambatan yang di hadapi.

1.4 Signifikasi dalam Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat juga signifikasi yang terbagi menjadi dua yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis, antara lain :

1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi” diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan dan keilmuan. Selain itu hasil studi yang dijadikan sebagai referensi yaitu :

Tri Susanti. Yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”. 2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi kepemimpinan kepala desa dalam membangun desa dan untuk mendeskripsikan kepala desa dalam membangun desa Bandung Rejo, hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu kepala desa sebagai pemimpin formal di desa sebagai motivator, fasilitator dan mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah di rencanakan. Oleh sebab itu fungsi ini dilaksanakan oleh seorang kepala desa dalam rangka pengembangan dan pembangunan desa. Kepala desa juga merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Maripah, berjudul “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. 2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan pembangunan desa seta langkah awal yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan kewenangan dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumberdaya hingga bisa dinikmati masyarakatnya, hasil penelitian ini menunjukan bahwa beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di setiap desa belum terlaksana dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah.

I Nyoman Marayasa, berjudul “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor”. 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Sukamulya, hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut, Sumber daya manusia masyarakat Desa Sukamulya masih tergolong rendah, dapat dilihat dari mayoritas penduduknya hanya tamatan Sekolah Dasar, mayoritas masyarakat Desa Sukamulya bermata pencaharian sebagai petani tradisional, masih minim sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sehingga kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih kurang layak, kondisi jalan yang rusak akibat banyaknya truk pengangkut pasir yang beroperasi sehingga minimnya sarana transportasi umum, untuk menghubungkan masyarakat Desa Sukamulya dengan masyarakat lain diluar desa, lahan kosong disewakan kepada perusahaan eksploitasi pasir sehingga tingkat polusi udara semakin kotor.

Asep Hermansyah, berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Sindanglaya Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut”. 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pembangunan fisik yang tidak tahan lama di karenakan dalam pemilihan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Desa Sindanglaya tidak objektif, dikarenakan adanya tekanan-tekanan dari pihak tertentu untuk mengisi jabatan dalam TPK untuk tujuan tertentu, hasil dari analisis penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Sindanglaya dikatakan kategori baik.

Muhammad Okto Adhitama, berjudul “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Sumber Daya Manusia”. 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting kepala desa terhadap organisasi desa serta sumberdaya manusia di desa tersebut, hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa program pembangunan sumberdaya manusianya sudah menunjukkan arah perkembangan yang positif dan ada kemajuan, dengan adanya sumberdaya manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Urbanus Hendri, berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”. 2019,

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa yang baik dalam pembangunan desa, hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi kepemimpinan dalam pembangunan yang ada di Desa Amboyo inti terutama infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih, dan pemberdayaan masyarakat, masih belum optimal dalam pengambilan keputusan yang ada di desa.

Denok Sunarsi, berjudul “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor”. 2020, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan kepala Desa Cidokom dalam melaksanakan kepemimpinannya yang diamanahkan oleh masyarakat desa melalui pemilihan umum, hasil penelitian, pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat desa, diketahui bahwa perkembangan desa cenderung statis dilihat dari belum adanya jaringan komunikasi modern, transportasi publik belum tersedia secara memadai dan tingginya tingkat kriminalitas serta lambatnya pelayanan birokrasi serta masih rendahnya tingkat pendidikan di Desa Cidokom dan tentunya kualitas SDM yang masih rendah tetapi jumlah penduduk lebih tinggi yang berstatus pengurus rumah tangga.

Dyan Septi Aning Dita, berjudul “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Banaran”. 2021, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kepemimpinan dan legitimasi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan, hasil penelitian dapat disimpulkan pola kepemimpinan kepala desa yang melibatkan masyarakat dalam program kerjanya. Kepala Desa juga menjalankan agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Dedi Supriadi, berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa”. 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa, hasil penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik desa dan menurut peneliti gaya kepemimpinan kepala desa sudah baik dan demokratis, karena selalu terbuka kepada bawahannya dan

melakukan musyawarah-musyawarah bersama BPD dan perangkat desa serta masyarakatnya.

Sri Handayani, berjudul “Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa”. 2021, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan dan partisipasi masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa yaitu strategi membangun desa dengan musyawarah desa yang berkualitas, strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kepala desa memberi motivasi dan inspirasi kepada bawahan dan masyarakatnya. Kepala Desa dan Pemerintah Desa tetap menjalankan gaya kepemimpinan yang sudah baik dan sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, namun Kepala Desa harus memperhatikan masyarakat khususnya perhatian di bidang pertanian.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi, selain itu untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan penelitian ini bisa digunakan untuk bahan kajian dalam bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan serta dimanfaatkan untuk menambah wawasan intelektual mengenai kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematik penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi *Perspektif* Teoritik, Definisi, Kerangka Pemikiran dan Asumsi Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi akademik, dan rekomendasi praktis serta saran untuk penelitian ini.

